

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan penerapan diskresi, di mana pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diatur oleh aturan hukum, tetapi juga melibatkan unsur penilaian pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap perdagangan manusia (Human Trafficking) yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia di wilayah hukum Polda Jambi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Adapun tipe penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Empiris. Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi Purposive Sampling. Penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang di tangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. dalam penegakan hukum ini dapat mengetahui tentang (a) bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang terjadi di wilayah hukum polda jambi, (b) bagaimana Kendala dan Upaya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking) di wilayah hukum Polda Jambi. Adapun upaya dilakukan untuk mengetahui 2 point tersebut yaitu, (a) Polda Jambi memiliki tim khusus untuk menangani perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan. Tim ini fokus pada kasus perempuan yang bekerja sebagai psk. (b) Penanganan TPPO di wilayah hukum Polda Jambi menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kesulitan identifikasi pelaku, kurangnya kerjasama antar lembaga, dan kesulitan pengumpulan bukti. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar lembaga, peningkatan kemampuan personel, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Penerapan upaya-upaya ini harus dilakukan secara efektif dan sesuai aturan.

Kata kunci: TPPO, Polda Jambi, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Law enforcement is a process carried out to ensure the functioning of legal norms in real terms as a guideline of behavior in the life of society and the state. Basically, law enforcement involves the application of discretion, where decision-making is not fully governed by the rule of law, but also involves an element of personal judgment. The purpose of this research is to know and understand the law enforcement against human trafficking that occurs in the jurisdiction of the Jambi Police. To find out and analyze the law enforcement mechanism for human trafficking cases in the jurisdiction of the Jambi Police, starting from the investigation stage to the trial. The type of research is Sociological Juridical. In writing this thesis, the author uses an empirical approach. The material collection technique was carried out by Purposive Sampling. Law enforcement of perpetrators of human trafficking crimes is handled by the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrim) of the Jambi Regional Police. In this law enforcement, it can be found out about (a) how law enforcement against perpetrators of human trafficking crimes occurs in the jurisdiction of the Jambi Police, (b) how are the obstacles and efforts against perpetrators of human trafficking crimes in the jurisdiction of the Jambi Police. Efforts are being made to find out these 2 points, namely, (a) The Jambi Police has a special team to handle human trafficking, especially those involving women. This team focuses on the case of women who work as prostitutes. (b) The handling of trafficking in the jurisdiction of the Jambi Police faces obstacles such as lack of public awareness, limited resources, difficulties in identifying perpetrators, lack of cooperation between institutions, and difficulties in collecting evidence. To overcome this, comprehensive efforts are needed including increasing public awareness, cooperation between institutions, improving personnel capabilities, utilizing technology, and community participation. The implementation of these efforts must be carried out effectively and in accordance with the rules.

Keywords: Trafficking, Jambi Police, Law Enforcement, Trafficking in Persons.